

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan sumber daya manusia yang unggul merupakan fondasi utama dalam pembangunan nasional dan daya saing global. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab strategis tidak hanya dalam mencetak lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga dalam mengembangkan potensi non-akademik, khususnya pembinaan atlet berprestasi.

Pembinaan atlet di lingkungan kampus merupakan manifestasi komitmen institusional dalam membentuk insan holistik yang mengintegrasikan aspek intelektual, fisik, dan mental secara seimbang (Coalter, 2013; Green, 2007).

Paradigma pendidikan modern menempatkan olahraga sebagai media pembentukan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan sosial yang esensial bagi mahasiswa (Bailey et al., 2013). Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebagai organisasi kemahasiswaan memiliki peran sentral dalam mengelola dan mengembangkan potensi atletik mahasiswa.

UKM Pencak Silat di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) menjadi wadah strategis dalam pembinaan atlet yang tidak hanya menguasai teknik bela diri tradisional, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai luhur seperti disiplin, sportivitas, dan solidaritas sosial (Channon & Jennings, 2014).

Pencak Silat, sebagai warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO, memiliki nilai strategis dalam memperkuat identitas nasional sekaligus berkontribusi pada prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional (Tan,

2016).

Namun, harapan ideal tersebut berhadapan dengan kenyataan yang kompleks. Pembinaan atlet kampus masih menghadapi kendala struktural dan fungsional, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antarunit, dan minimnya dukungan institusional yang terintegrasi (Houlihan & Green, 2008).

UKM Pencak Silat UMRAH telah mencetak prestasi di berbagai kejuaraan namun terdapat ketimpangan antara potensi yang dimiliki dan sistem pembinaan dijalankan. Hal ini tampak dalam kondisi empiris seperti tidak tersedianya lokasi latihan yang memadai, alat latihan (pacing, pelindung tubuh) yang sudah rusak namun tidak diganti, serta keterlambatan dan ketidakpastian proses reimburse dana pembinaan.

Situasi ini mencerminkan lemahnya koordinasi, rendahnya prioritas kelembagaan serta belum berfungsi mekanisme tata kelola yang mampu menyatukan berbagai pemangku kepentingan dalam pembinaan atlet secara sistematis dan terintegrasi. Tantangan menjaga keseimbangan antara tuntutan akademik dan non- akademik bagi para atlet juga menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius (Stambulova et al., 2020).

Pembinaan yang dilakukan secara parsial dan terfragmentasi berpotensi menghambat pencapaian prestasi optimal dan pengembangan karakter berkelanjutan. Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, paradigma *collaborative governance* muncul sebagai solusi tata kelola yang efektif dan inklusif.

Pendekatan ini menekankan keterlibatan multi-pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program secara partisipatif dan

sinergis (Ansell & Gash, 2008; Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012).

Collaborative governance memungkinkan integrasi sumber daya, pengetahuan, dan kapabilitas dari berbagai aktor, termasuk pengurus UKM, pelatih, fakultas, dan unit kemahasiswaan, sehingga menciptakan ekosistem pembinaan yang holistik dan berkelanjutan (Bryson, Crosby, & Stone, 2015).

Era digital dan globalisasi menuntut institusi pendidikan mengadopsi model tata kelola yang lebih terbuka dan partisipatif guna menghadapi tantangan yang semakin dinamis (Bryson, Crosby, & Bloomberg, 2014). Model *collaborative governance* memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya secara efektif, meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program pembinaan (Ansell & Gash, 2008).

Studi internasional menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dalam pembinaan atlet dapat meningkatkan hasil prestasi dan kesejahteraan atlet secara signifikan (Wicker, Breuer, & Pawlowski, 2012; Misener & Doherty, 2014). seperti perbedaan kepentingan, komunikasi yang kurang efektif, dan ketimpangan sumber daya antaraktor (Emerson et al., 2012). Di lingkungan perguruan tinggi, hambatan ini semakin kompleks karena tuntutan akademik yang ketat dan dinamika organisasi yang khas, sehingga memerlukan strategi manajemen yang adaptif dan inovatif (Huxham & Vangen, 2005).

Di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), UKM Pencak Silat telah menunjukkan potensi sebagai wadah pembinaan atlet yang mampu menghasilkan prestasi di tingkat regional dan nasional. Namun, hambatan seperti kurangnya koordinasi antarunit, keterbatasan fasilitas, dan tantangan menjaga keseimbangan

akademik dan non-akademik masih menghambat optimalisasi pembinaan.

Hambatan nyata lainnya yang terjadi pada kampus UMRAH yaitu fasilitas tidak memadai contohnya pecing yang sudah usang tidak diganti dengan yang layak, terhambatnya fasilitas tersebut juga dapat menghambat perkembangan atlet UKM Pencak Silat.

Tidak hanya peralatan namun lokasi latihan juga tidak disediakan oleh kampus ternama ini. Tidak hanya itu permasalahan yang harus segera diselesaikan ialah Reimburse dana (Penggantian uang pribadi yang telah dipakai berdasarkan nota anggaran dari kampus) yang tak kunjung terselesaikan.

hensif mekanisme *collaborative governance* dalam pembinaan atlet UKM Pencak Silat UMRAH, mengidentifikasi peran aktor ,hambatan serta dampak kolaborasi terhadap prestasi atlet. Harapan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan tata kelola pembinaan atlet di perguruan tinggi melalui penguatan sinergi antar pemangku kepentingan.

Dengan demikian, diharapkan tercipta ekosistem pembinaan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menghasilkan atlet berprestasi yang unggul multidimensional, baik dalam olahraga maupun akademik. Penelitian ini juga diharapkan memperkaya ilmu administrasi negara dan manajemen olahraga serta memberikan rekomendasi kebijakan aplikatif bagi pengelola UKM dan institusi pendidikan tinggi.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan dalam pem-binaan atlet, pendekatan tradisional yang bersifat hierarkis dan terpusat ter-bukti kurang efektif dalam menjawab kebutuhan dinamis dan multidimen-sional yang dihadapi

oleh institusi pendidikan tinggi (Klijn & Koppenjan, 2016).

Oleh karena itu, *collaborative governance* menawarkan paradigma baru yang menekankan pada jaringan interaksi antaraktor yang bersifat horizontal dan partisipatif, yang memungkinkan adaptasi dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya dan program pembinaan (Sørensen & Torfing, 2016).

Pendekatan ini juga menekankan pentingnya kepercayaan, komunikasi terbuka, dan pembagian tanggung jawab yang jelas sebagai fondasi keberhasilan kolaborasi (Ansell & Gash, 2008). Lebih jauh, literatur manajemen olahraga menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan atlet sangat bergantung pada kualitas tata kelola yang mampu mengintegrasikan aspek teknis, psikologis, dan sosial secara simultan (Ferkins, Shilbury, & McDonald, 2009).

Governance yang inklusif dan kolaboratif tidak hanya meningkatkan efektivitas pelatihan, tetapi juga memperkuat kesejahteraan atlet melalui dukungan holistik yang mencakup aspek akademik dan pengembangan karakter (Taylor, Doherty, & McGraw, 2015).

Oleh karena itu, pembinaan atlet di perguruan tinggi harus dirancang dengan pendekatan multidisipliner yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara sinergis.

Namun demikian, hambatan budaya organisasi dan perbedaan kepentingan antar pemangku kepentingan seringkali menjadi penghalang utama dalam implementasi governance kolaboratif (Emerson et al., 2012).

Dalam konteks perguruan tinggi, dinamika birokrasi dan struktur organisasi yang kompleks menuntut strategi manajemen yang mampu men-

jembatani perbedaan tersebut dan menciptakan konsensus yang produktif (Huxham & Vangen, 2005).

Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengkaji faktor-faktor penghambat dan strategi mitigasi yang dapat diterapkan untuk memperkuat kolaborasi dalam pembinaan atlet. Selain itu, perkembangan kebijakan olahraga nasional dan internasional semakin menekankan pentingnya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagai prasyarat untuk mencapai prestasi olahraga yang berkelanjutan dan berintegritas (IOC, 2019; UNESCO, 2015).

Perguruan tinggi sebagai bagian dari ekosistem olahraga nasional harus mampu menyesuaikan diri dengan standar tata kelola tersebut agar dapat berkontribusi secara optimal dalam pengembangan atlet berprestasi. Hal ini menuntut adanya sinergi antara kebijakan institusi, praktik pembinaan, dan tata kelola yang adaptif.

Dalam konteks UMRAH, UKM Pencak Silat memiliki potensi besar untuk menjadi model pembinaan atlet yang mengintegrasikan prinsip-prinsip governance kolaboratif. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya tereksplorasi dan dioptimalkan akibat kurangnya mekanisme koordinasi dan komunikasi yang sistematis antarunit terkait. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis mendalam dan rekomendasi strategis yang kontekstual dan aplikatif.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu administrasi negara dan manajemen olahraga,

serta praktik nyata pembinaan atlet di perguruan tinggi. Dengan mengkaji secara komprehensif mekanisme Tata Kelola Kolaboratif dalam UKM Pencak Silat UMRAH. Penelitian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan strategi implementasi yang aplikatif dan kontekstual, sehingga dapat memperkuat ekosistem pembinaan atlet yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Berdasarkan permasalahan di latar belakang di atas, maka dari itu penelitian ini berjudul —Tata Kelola Kolaboratif dalam Pembinaan Atlet Kampus Berprestasi Yang Tergabung Dalam Ukm Pencak Silat Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)|

1.1.1 Urgensi Prestasi Pencak Silat di Tingkat Universitas/Nasional

Pencak silat merupakan salah satu cabang olahraga bela diri tradisional yang memiliki nilai budaya, pendidikan, dan prestasi yang sangat penting di Indonesia. Sebagai warisan budaya bangsa yang telah diakui oleh UNESCO, pencak silat tidak hanya berfungsi sebagai olahraga kompetitif, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, disiplin, sportivitas, dan identitas nasional generasi muda.

Dalam lingkungan perguruan tinggi, pencak silat menjadi wadah pengembangan potensi mahasiswa baik dalam aspek akademik maupun non-akademik melalui kegiatan pembinaan olahraga prestasi. Di tingkat nasional, perkembangan pencak silat menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya kejuaraan yang diselenggarakan mulai dari tingkat daerah, nasional, hingga internasional seperti Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS), Kejuaraan Nasional Mahasiswa, serta ajang Pekan Olahraga Nasional (PON).

Persaingan antar perguruan tinggi dalam cabang olahraga pencak silat juga semakin kompetitif karena prestasi olahraga menjadi salah satu indikator kualitas pembinaan kemahasiswaan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, setiap universitas dituntut untuk memiliki sistem pembinaan atlet yang terstruktur agar mampu menghasilkan atlet berprestasi dan mampu bersaing di berbagai ajang kompetisi.

Prestasi pencak silat di tingkat universitas memiliki urgensi yang tinggi karena dapat memberikan dampak positif terhadap citra dan reputasi institusi pendidikan. Keberhasilan mahasiswa dalam meraih prestasi olahraga dapat meningkatkan nama baik universitas di tingkat regional maupun nasional.

Selain itu, prestasi olahraga juga menjadi salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengembangan potensi mahasiswa melalui kegiatan kemahasiswaan dan pembinaan karakter.

Dengan adanya prestasi yang konsisten, perguruan tinggi dapat memperkuat daya saing institusi serta meningkatkan minat calon mahasiswa terhadap universitas tersebut. Dalam konteks Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), pembinaan prestasi pencak silat menjadi penting untuk diperhatikan mengingat potensi mahasiswa yang cukup besar dalam bidang olahraga bela diri.

Keberadaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) pencak silat di UMRAH tidak hanya menjadi sarana pengembangan bakat mahasiswa, tetapi juga menjadi representasi universitas dalam berbagai kompetisi olahraga. Namun, untuk mencapai prestasi yang optimal diperlukan dukungan pembinaan yang baik melalui kerja sama berbagai pihak seperti universitas, pelatih, organisasi olahraga, serta mahasiswa sebagai atlet. Urgensi pembinaan pencak silat di UMRAH juga

berkaitan dengan kebutuhan akan sistem collaborative governance dalam pengelolaan olahraga prestasi.

Pembinaan atlet tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak, melainkan membutuhkan kolaborasi antara stakeholder terkait agar proses pembinaan berjalan efektif dan berkelanjutan. Tanpa adanya koordinasi, dukungan fasilitas, pendanaan, dan komunikasi yang baik antaraktor, maka pencapaian prestasi akan sulit diwujudkan secara maksimal.

Oleh sebab itu, perhatian terhadap pembinaan dan prestasi pencak silat di UMRAH menjadi hal yang penting untuk mendukung pengembangan olahraga mahasiswa sekaligus meningkatkan reputasi universitas di tingkat nasional.

1.1.2 Gap Analysis (Analisis Kesenjangan Koordinasi)

Pembinaan olahraga prestasi di perguruan tinggi membutuhkan koordinasi yang baik antaraktor agar proses pembinaan atlet dapat berjalan optimal. Dalam pembinaan pencak silat di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), terdapat beberapa pihak yang berperan, seperti rektorat, UKM pencak silat, pelatih, IPSI, dan KONI.

Namun, koordinasi antaraktor tersebut masih belum berjalan secara maksimal. Secara ideal, rektorat menyediakan kebijakan, pendanaan, dan fasilitas, UKM melaksanakan pembinaan atlet, sedangkan IPSI dan KONI mendukung pembinaan teknis serta kompetisi.

Akan tetapi, pada kenyataannya komunikasi antaraktor masih bersifat formalitas dan hanya dilakukan pada saat tertentu, seperti menjelang perlombaan atau pengajuan anggaran. Akibatnya, pembinaan atlet sering mengalami hambatan

dalam fasilitas, pendanaan, dan keberlanjutan program latihan.

Selain itu, perbedaan prioritas antaraktor juga menyebabkan koordinasi menjadi kurang fleksibel. Pihak universitas lebih fokus pada aspek akademik dan administrasi, sedangkan organisasi olahraga berorientasi pada pencapaian prestasi. Kondisi ini membuat pembinaan atlet belum berjalan secara sinergis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pola *collaborative governance* yang lebih terbuka dan terintegrasi agar seluruh stakeholder dapat bekerja sama secara efektif dalam mendukung peningkatan prestasi pencak silat di UMRAH.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui:

1. Bagaimana struktur dan mekanisme *collaborative governance* yang dijalankan dalam pembinaan atlet berprestasi di UKM Pencak Silat UMRAH?
2. Siapa saja aktor yang terlibat dalam tata kelola *collaborative* tersebut dan bagaimana bentuk kontribusi serta interaksi antar aktor dalam forum *collaborative*?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan *collaborative governance* pada pembinaan atlet di UKM Pencak Silat UMRAH

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme collaborative governance yang diterapkan dalam pembinaan atlet berprestasi di UKM Pencak Silat UMRAH.
2. Mengidentifikasi peran dan kontribusi masing-masing aktor dalam proses pembinaan atlet melalui model collaborative governance.
3. Mengungkap faktor-faktor penghambat dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan collaborative governance pada pembinaan atlet di UKM Pencak Silat UMRAH.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan bahwa temuan penelitian akan memiliki manfaat teoritis dan praktis. Beberapa manfaat yang diharapkan terkait dengan fenomena yang dibahas adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dan aplikatif bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pembinaan atlet di lingkungan perguruan tinggi, khususnya UKM Pencak Silat UMRAH. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dan pedoman bagi pengelola UKM, pelatih, fakultas, serta unit kemahasiswaan dalam merancang dan mengimplementasikan mekanisme *collaborative governance* yang lebih efektif dan efisien.

Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan sinergi antar pemangku kepentingan, diharapkan proses pembinaan atlet dapat berjalan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan prestasi atlet secara

signifikan.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan manfaat praktis bagi pengambil kebijakan di tingkat universitas maupun pemerintah daerah. Temuan mengenai hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan governance kolaboratif dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan mendukung pengembangan olahraga prestasi di kam-pus.

Misalnya, kebijakan terkait alokasi anggaran, penyediaan fasilitas, pelatihan pelatih, serta program pendampingan akademik bagi atlet dapat disesuaikan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini.

Hal ini akan memperkuat ekosistem pembinaan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Lebih jauh, penelitian ini juga bermanfaat bagi komunitas atlet dan masyarakat luas sebagai penerima manfaat langsung dari pembinaan yang berkualitas. Dengan tata kelola yang kolaboratif dan partisipatif, atlet tidak hanya mendapatkan pelatihan teknis yang optimal, tetapi juga dukungan psikologis, akademik, dan sosial yang menyeluruh.

Hal ini akan meningkatkan motivasi, kesejahteraan, dan daya saing at-let dalam kompetisi regional, nasional, maupun internasional. Pada akhirn-ya, keberhasilan pembinaan atlet berprestasi di kampus akan turut mem-perkuat citra dan reputasi institusi pendidikan serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan olahraga nasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Rekomendasi Kebijakan

Membahas manfaat penelitian sebagai dasar perumusan ke-bijakan yang

mendukung pengembangan olahraga prestasi di perguruan tinggi, termasuk alokasi anggaran, penyediaan fasilitas, dan pro-gram pendampingan akademik bagi atlet.

2. Pengelola UKM dan Pelatih

Menjelaskan bagaimana hasil penelitian dapat menjadi pedoman praktis bagi pengurus UKM dan pelatih dalam mengoptimalkan kolaborasi antar pemangku kepentingan, meningkatkan koordinasi, dan mengelola sumber daya secara efektif untuk pembinaan atlet.

3. Atlet dan Komunitas Olahraga

Menguraikan bagaimana tata kelola kolaboratif yang efektif dapat meningkatkan kualitas pembinaan, kesejahteraan, dan prestasi atlet, serta memberikan manfaat sosial dan reputasi positif bagi institusi dan masyarakat luas.

